



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENURUNAN PRODUKSI TIMAH PT TIMAH TBK

Monika Suhayati
Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

PT Timah Tbk melaporkan penurunan kinerja produksi pada kuartal pertama tahun 2025. Sepanjang periode tersebut, produksi bijih timah perusahaan tercatat sebesar 3.215 ton Sn, mengalami penurunan 40% secara tahunan (YoY) dibandingkan pada kuartal I tahun 2024 sebanyak 5.360 ton Sn. Produksi logam timah juga menurun 31% YoY menjadi 3.095 metrik ton Sn, dari sebelumnya 4.475 metrik ton Sn pada periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, volume penjualan logam timah PT Timah Tbk turut melemah, turun 18% YoY menjadi 2.874 metrik ton, dibandingkan dengan 3.524 ton pada kuartal I tahun 2024.

Timah memiliki berbagai manfaat dan aplikasi luas untuk kehidupan sehari-hari dan industri. Dalam industri elektronik, timah digunakan sebagai bahan utama solder, pelapis tembaga pada papan sirkuit cetak, serta pembuatan kabel dan konduktor listrik. Di industri kemasan makanan dan minuman, timah berperan sebagai pelapis kaleng baja untuk mencegah korosi dan melindungi isi, serta digunakan dalam tutup botol dan segel. Dalam industri otomotif, timah digunakan untuk paduan bantalan, pelapis anti korosi, dan solder. Di industri konstruksi, timah dimanfaatkan untuk atap, talang, dan pipa. Timah juga berperan dalam proses pembuatan kaca (*float glass*) dan pelapis kaca. Saat ini, timah belum tergantikan oleh komoditas lain sehingga permintaan pasar terhadap timah terus meningkat setiap tahun.

Holding BUMN sektor pertambangan, MIND ID, mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari tiga negara penghasil timah terbesar di dunia, bersama dengan Tiongkok dan Peru. Pada tahun 2023, Indonesia menyumbang sekitar 17,5% dari total pasokan timah global, dengan produksi mencapai 65 ribu ton. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, yang merujuk pada data ekspor tahun tersebut. Namun demikian, produksi timah nasional mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan volume hanya 45 ribu ton sehingga kontribusinya terhadap pasokan global turun menjadi sekitar 12%. Penurunan produksi ini turut memicu kenaikan harga timah dunia dari rata-rata US\$26.583 per ton pada 2023 menjadi US\$31.164 per ton pada 2024.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada 14 Mei 2025 terkait Evaluasi dan Pengembangan Tata Niaga Komoditas Timah, Direktur Utama PT Timah Tbk menyampaikan bahwa penurunan produksi logam timah dari 2021 hingga kuartal I 2025 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengganggu operasi dan merusak cadangan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, keterlambatan produksi di wilayah baru akibat tumpang tindih tata ruang, serta belum optimalnya tata kelola penambangan dan perdagangan timah. Selain itu, menurut Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, musim hujan yang berlangsung sejak Desember 2024 hingga Maret 2025 juga turut menurunkan produksi bijih timah.

Wilayah IUP PT Timah Tbk mencakup 288.638 hektare di darat dan 184.672 hektare di laut. Namun, PT Timah Tbk hanya menyumbang 25% dari total produksi timah nasional, sementara 75% diproduksi oleh swasta. Keterlibatan swasta, terutama melalui kerja sama dengan smelter, telah menimbulkan konsekuensi serius, termasuk kerugian negara. Dalam vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Kadis ESDM Bangka Belitung (2021–2024) pada 11 Desember 2024, hakim menyebut penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk selama 2015–2022 menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun. Penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk hingga kerja sama dengan smelter swasta mengakibatkan kerugian Rp26,6 triliun. Akibat berikutnya, yaitu kerusakan lingkungan senilai Rp271 triliun dengan kerusakan hutan seluas 75 ribu hektare.

Atensi DPR

Penurunan kinerja produksi PT Timah Tbk mengakibatkan kenaikan harga timah dunia. Hal ini mengingatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara penghasil timah terbesar di dunia yang menyumbang hingga 17,5% pada 2023, namun menurun hingga 12% pada 2024 dari total pasokan timah global. Komisi VI DPR RI, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu memastikan PT Timah Tbk melakukan berbagai upaya mengatasi penurunan kinerja produksi tersebut, antara lain dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum aktivitas penambangan ilegal di wilayah IUP serta mengoptimalkan tata kelola penambangan dan perdagangan timah. Pemerintah juga perlu segera menetapkan harga pokok mineral (HPM) timah sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah nasional. Belum adanya HPM komoditas timah menyebabkan ketimpangan tata niaga timah, khususnya dalam konteks penjualan, ekspor, dan kepastian penerimaan negara. PT Timah Tbk juga perlu mempunyai kerja sama strategis dengan Tiongkok dan Peru untuk meningkatkan peranan dalam pasar global

Sumber

detik.com, 15 Mei 2025 & 11 Desember 2024;
cnbcindonesia.com, 14 Mei 2025;
jpnn.com, 15 Mei 2025;
kontan.co.id, 6 Mei 2025;
liputan6.com, 26 Desember 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*